

Analisis Peluang Kerja Lulusan Pendidikan Administrasi Perkantoran dalam Rekrutmen Pegawai Pemerintah Kelompok Teknis 2022

Analysis of Job Opportunities for Graduates of Office Administration Education in the 2022 Recruitment of Technical Government Employees.

Wahyu Rusdiyanto^{a1*}, Junica Ismawati^{b2}, Zulkarnaen^{c3}

^aAdministrasi Perkantoran, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Yogyakarta

^{b,c}Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Yogyakarta

¹wahyu_rusdiyanto@uny.ac.id;

²junicaismawati.2021@student.uny.ac.id

³zulkarnaen.2022@student.uny.ac.id

*Penulis koresponden

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang kerja lulusan pendidikan administrasi perkantoran pada rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Teknis Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi tentang informasi jenis pengadaan, instansi, serta tingkat pendidikan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu website resmi rekrutmen PPPK (sscasn.bkn.go.id). Selanjutnya, data dianalisis untuk mendapatkan informasi jenis formasi jabatan dan instansi yang membuka lowongan. Analisis deskriptif digunakan untuk mendapatkan informasi jenis lowongan pekerjaan dan kantor pemerintah penyedia lowongan pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 1901 peluang kerja untuk lulusan Pendidikan Administrasi Perkantoran. Peluang kerja terbanyak berada di Kementerian Agama. Formasi pekerjaan yang tersedia yaitu arsiparis dan analis kebijakan. Namun, lulusan pendidikan administrasi perkantoran harus bersaing dengan lulusan program studi lain yang layak mengisi formasi tersebut.

Kata Kunci: Rekrutmen, Pegawai Pemerintah, Pendidikan Administrasi Perkantoran

Abstract

This study aims to analyze job opportunities for graduates of office administration education in the recruitment of Government Employees with Employment Agreements (PPPK) for the 2022 Technical group. This research uses a content analysis method with a qualitative approach. Collecting data in this study uses documentation about information on types of procurement, agencies, and levels of education. This study's data source is the official PPPK recruitment website (sscasn.bkn.go.id). Descriptive analysis is used to obtain information on the types of job vacancies and government offices providing job vacancies. The results showed 1901 job opportunities for Office Administration Education graduates. Most job opportunities are in the Ministry of Religion. Available job formations are archivists and policy analysts. However, graduates of office administration education must compete with graduates of other study programs who are eligible to fill this formation.

Keywords: Recruitment, Government Employees, Office Administration Education

1. Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor penting dalam kemajuan organisasi adalah kualitas sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang kompeten akan

mendukung tercapainya tujuan organisasi. Pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi membuat cara pandang yang berbeda dan berkembang. Dahulu, manusia dipandang hanya sebagai salah satu faktor

produksi. Pada saat ini, manusia dipandang sebagai aset organisasi yang perlu dijaga dan dikembangkan. Perbedaan cara pandang tersebut mengubah istilah *human resource development* menjadi *human capital*.

Saat manusia dipandang sebagai aset terjadi perbedaan perlakuan yang fundamental dibandingkan saat manusia dipandang sebagai faktor produksi. Manusia sebagai aset dengan segala dinamikanya harus dikelola dengan baik. Layaknya aset lain, manusia jika dikeola dengan baik diyakini akan berkontribusi besar pada kemajuan organisasi. Oleh karena itu, tahap awal pencarian sumber daya manusia yang akan masuk sebagai anggota organisasi harus dilakukan dengan baik dan benar.

Pencarian sumber daya manusia yang berkompeten dan sesuai kompetensinya dapat dilakukan melalui rekrutmen. Melalui rekrutmen suatu instansi dapat memperoleh sumber daya manusia yang potensial sesuai harapan (Citra R & Yunus, 2020). Semakin banyak pelamar maka akan semakin banyak kemungkinan memperoleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Kompetensi artinya kemampuan atau keterampilan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan (Hendriani et al., 2013).

Rekrutmen pegawai negeri sipil merupakan proses seleksi pegawai sesuai kebutuhan pemerintah. Kebutuhan pada suatu instansi pada umumnya disebabkan oleh banyaknya pegawai yang pensiun (Citra R & Yunus, 2020). Setiap warga negara yang memenuhi persyaratan mendapat kesempatan mendaftar sebagai calon pegawai negeri. Proses rekrutmen yang baik diketahui memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (Renaldo Potale et al., 2016). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik proses rekrutmen maka kinerja pegawai juga semakin baik.

Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan Undang-undang tersebut maka tidak ada lagi pegawai tidak tetap atau honorer, hanya ada pegawai negeri dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (Mahaputra et al., 2014). Berdasarkan UU ASN tersebut,

tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS atau Calon PPPK harus mengikuti proses mekanisme seleksi yang telah ditentukan (Qomarani, 2020). Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 PPPK adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan. Pemerintah telah mengatur kesejahteraan, penilaian kerja, serta perlindungan hukum PPPK. Berbeda dengan ASN pada umumnya, kesejahteraan PPPK akan berbanding lurus dengan penilaian kerja. Semakin baik penilaian kerja maka semakin baik pula kesejahteraannya (Nasrullah et al., 2018). Keberadaan PPPK dianggap dapat mengatasi masalah pegawai tidak tetap atau honorer yang setiap saat meningkat dan sudah lama berlangsung (Tobirin, 2015).

Pemerintah Indonesia melakukan rekrutmen PPPK untuk menggantikan pegawai pemerintah yang akan pensisun. Sampai tahun 2023 ini, pemerintah sudah melaksanakan rekrutmen PPPK untuk kelompok guru, kelompok medis dan kelompok teknis. Pada rekrutmen PPPK Teknis 2022, ditemukan fakta yang menarik. Rekrutmen yang ditujukan untuk mengisi pegawai teknis ternyata membuka lowongan tahu peluang kerja bagi lulusan pendidikan yang seharusnya dipersiapkan untuk menjadi guru. Salah satu program studi yang banyak muncul dalam lowongan tersebut adalah pendidikan administrasi perkantoran.

Pendidikan administrasi perkantoran adalah program studi yang mempunyai profil lulusan utama menjadi guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis (MPLB). Profil tersebut didapat dari beberapa website program studi dan kurikulum program studi pendidikan administrasi perkantoran diantaranya Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Malang, Universitas Sebelas Maret, dll. Munculnya peluang kerja lulusan pendidikan administrasi perkantoran selain menjadi guru tentu menjadi angin segar bagi lulusan program studi tersebut. Di Indonesia, program studi pendidikan administrasi perkantoran berada pada level sarjana strata 1 (S1).

Sesuai nomenklatur program studinya, mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran mempunyai profil lulusan utama sebagai guru. Namun, selain dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan bidang kependidikan atau pedagogik, mahasiswa lulusan program studi tersebut juga dibekali dengan kemampuan ilmu lain seperti administrasi, manajemen, komunikasi, etika, dll. Bekal pengetahuan dan keterampilan tersebut dinilai cukup menjadi modal dalam melamar pekerjaan selain menjadi guru. Lulusan pendidikan administrasi perkantoran mempunyai kompetensi yang unggul karena memiliki pengetahuan serta ketrampilan tata kelola administrasi kantor yang baik sehingga mampu bersaing di dunia kerja. Keunggulan tersebut dinilai dapat memenuhi kebutuhan perusahaan maupun instansi pemerintah.

Salah satu komponen penilaian akreditasi program studi di perguruan tinggi adalah penilaian tentang alumni. Suatu program studi dinilai unggul apabila lulusan program studi tersebut tidak banyak yang menganggur. Artinya, lulusan program studi tersebut cepat terserap tenaga kerja atau mampu membuka usaha sendiri (wirausaha). Setiap tahun, kampus-kampus di Indonesia melakukan *tracer study* untuk mengetahui apakah lulusan mereka banyak yang menganggur atau tidak. Program studi dituntut untuk mampu membuat program-program agar lulusan mereka menjadi lulusan yang berdaya dan berdampak, bukan lulusan yang hanya menambah angka pengangguran.

Salah satu bentuk upaya meningkatkan kualitas lulusan adalah membuat peta karir yang jelas. Penelitian mengenai peluang kerja lulusan suatu program studi dapat bermanfaat bagi pemetaan karir. Lulusan yang akan melamar di formasi jabatan tertentu dapat memperkirakan karir mereka dari segi tugas pokok dan fungsi pekerjaan, tempat mereka akan bekerja bahkan pendapatan yang mungkin didapatkan. Penelitian mengenai peluang kerja juga dapat menjadi masukan bagi pengelola program studi dalam merumuskan profil lulusan. Perumusan profil lulusan akan mempengaruhi penyusunan kurikulum dan mata kuliah yang dipelajari.

Penelitian tentang identifikasi lowongan pekerjaan bidang administrasi perkantoran

sudah pernah dilakukan diantaranya oleh Prasetio & Hariyani (2021) dan Purwanto et al. (2020). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa metode analisis konten dapat digunakan untuk mengidentifikasi lowongan pekerjaan sehingga mengetahui tren pasar kebutuhan tenaga kerja. Namun, penelitian yang telah dilakukan tersebut belum menganalisis tentang rekrutmen untuk pegawai pemerintah. Penelitian tentang peluang karir dan rekrutmen pegawai perlu dilakukan mengingat minat angkatan kerja untuk menjadi pegawai pemerintah masih tinggi. Kondisi tersebut, diperkuat dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja karyawan swasta saat pandemi Covid-19. Menjadi pegawai di instansi pemerintah dinilai aman bagi para pencari kerja dari krisis-krisis seperti saat pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kelompok teknis bagi lulusan pendidikan administrasi perkantoran.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Sumber data utama dalam penelitian ini data tentang peluang karir bagi lulusan pendidikan administrasi perkantoran dari website resmi rekrutmen PPPK yaitu <https://sscasn.bkn.go.id/>. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan Microsoft Excel. Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengikuti konsep yang diberikan (Lodico, et al., 2006). Berdasarkan model analisis data tersebut, penelitian ini menggunakan tahap-tahap analisis data sebagai berikut: 1) mengorganisasi data dan melakukan pemeriksaan data dengan cermat, 2) melakukan pemeriksaan ulang terhadap data, 3) melakukan pengolahan data lebih lanjut. Peneliti mendeskripsikan, meringkas, dan mengorganisasi kode-kode yang berisi kategori-kategori yang sudah lebih spesifik dan berbeda dari kategori yang lain, 4) melakukan analisis terakhir, membuat interpretasi dan kesimpulan akhir berisi hasil temuan penelitian. Analisis tersebut digunakan untuk memberikan informasi tentang peluang kerja lulusan pendidikan

administrasi perkantoran berdasarkan instansi dan profil jabatan.

3. Hasil dan Pembahasan Hasi Penelitian

Rekrutmen merupakan proses mencari dan menemukan calon pegawai sesuai kebutuhan suatu organisasi (Martin, 2015). Proses perekrutan pegawai khususnya pegawai negeri dimulai dengan perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil hingga pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) maka tidak ada lagi pegawai tidak tetap atau honorer, hanya ada pegawai negeri dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada rekrutmen PPPK Teknis tahun 2022, muncul peluang bagi mahasiswa lulusan program studi kependidikan. Salah satunya adalah program studi pendidikan administrasi perkantoran. Informasi mengenai peluang kerja mahasiswa lulusan pendidikan administrasi perkantoran didapatkan dari website resmi <https://data-sscasn.bkn.go.id> dengan rincian jabatan disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rincian Peluang Kerja berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	ahli pertama-analisis kebijakan	403	21,2%
2	ahli pertama-arsiparis	1498	78,8%
	Jumlah	1901	100%

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Berdasarkan Tabel 1 didapatkan bahwa terdapat 1901 peluang formasi atau lowongan pekerjaan untuk lulusan program studi pendidikan administrasi perkantoran. Peluang kerja yang paling banyak yaitu jabatan ahli pertama-arsiparis dengan jumlah 1498 atau sebanyak 78,8%. Formasi lain yaitu jabatan ahli pertama-analisis kebijakan dengan jumlah 403 atau sebanyak 21,19%.

Peluang kerja tersebut terbagi dalam tiga instansi yang membuka lowongan. Distribusi instansi pemerintah yang membuka peluang kerja bagi lulusan pendidikan administrasi perkantoran berasal dari tiga kementerian seperti yang disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rincian Peluang Kerja berdasarkan Instansi

No	Instansi	Jumlah Formasi	Persentase
1	Kementerian Agama	1893	99,58%
2	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	7	0,37%
3	Kementerian Perhubungan	1	0,05%

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Berdasarkan Tabel 2 didapatkan bahwa kebutuhan atau formasi paling banyak terdapat di kementerian agama dengan jumlah 1893 orang atau sebanyak 99,58%. Dilanjutkan dengan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi sebanyak 7 orang atau sebanyak 0,37% dan yang terakhir adalah kementerian perhubungan dengan jumlah 1 orang atau sebanyak 0,05%.

Dari data tiga kementerian tersebut, selanjutnya dianalisis berdasarkan rencana penempatan. Pada rekrutmen PPPK Teknis 2023, lulusan pendidikan administrasi perkantoran tidak banyak yang direncanakan di kantor pusat. Rencana penempatan berada di organisasi atau kantor di bawah kementerian dengan rincian sebagai berikut:

No	Penempatan	Jumlah	Persentase
1	Perguruan tinggi	67	46%
2	Kantor Pemerintah (Kantor Wilayah, Balai, UPT)	79	54%

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Berdasarkan tabel tersebut didapatkan bahwa dalam rekrutmen PPPK Teknis 2022, rencana penempatan paling banyak bagi lulusan pendidikan administrasi perkantoran terdapat pada kantor pemerintah seperti Kanwil, Balai maupun UPT dengan jumlah 79 atau 54% sedangkan rencana penempatan pada perguruan tinggi dibawah naungan kementerian pendidikan dan kementerian agama sebanyak 67 atau 46%.

Pembahasan

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa formasi jabatan rekrutmen PPPK Tahun 2022

untuk lulusan pendidikan administrasi perkantoran dengan persentase terbesar adalah Jabatan Ahli Pertama-Arsiparis sebesar 78,8%. Menurut Undang Undang Nomor.43 Tahun 2009, Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Fenomena ini selaras dengan pembelajaran yang ditempuh lulusan pendidikan administrasi perkantoran di perkuliahan. Berdasarkan hasil dokumentasi kurikulum di berbagai perguruan tinggi, program studi pendidikan administrasi perkantoran mempunyai mata kuliah atau bahan kajian khusus tentang kearsipan. Kondisi tersebut tentu sesuai dengan peluang kerja yang tersedia.

Menurut Permen PAN No. PER/3/M.PAN/3/2009, Arsiparis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Profesi arsiparis membutuhkan karakter pribadi yang kuat karena arsiparis harus bertanggung jawab mengelola data-data dan persoalan kearsipan secara komprehensif. Arsip merupakan komponen vital bagi berlangsungnya kegiatan organisasi. Pengelolaan arsip yang baik akan memudahkan proses pencarian informasi dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, di instansi atau lembaga mana pun seorang arsiparis seharusnya mutlak diperlukan.

Formasi lain yang juga dapat dilamar dan tersedia cukup banyak bagi lulusan pendidikan administrasi perkantoran adalah ahli pertama - analis kebijakan. Analis Kebijakan adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan termasuk dalam rumpun manajerial. Beberapa tugas atau pekerjaan pokok formasi ini adalah melakukan riset dan analisis kebijakan, memberikan rekomendasi kebijakan, melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi dan

negosiasi kebijakan, serta melakukan publikasi hasil kajian kebijakan. Bagi lulusan pendidikan administrasi perkantoran yang berniat melamar formasi ini berarti harus cakap dan mahir tentang konsep manajemen dan organisasi. Selain itu, keterampilan komunikasi yang baik juga dapat menjadi faktor pendukung kesuksesan lulusan yang akan berkarir di formasi ini.

Lulusan pendidikan administrasi perkantoran perlu mempersiapkan diri dengan baik apabila ingin melamar jabatan arsiparis dan analis kebijakan. Hal ini dikarenakan lowongan kerja tersebut tidak dikhususkan untuk lulusan pendidikan administrasi perkantoran saja. Namun, juga dapat dilamar dari lulusan program studi lain yang sejenis dan relevan seperti program studi kesekretariatan, administrasi publik, kearsipan, manajemen dll. Persiapan diri dapat dilakukan dengan cara berlatih mengerjakan soal-soal seleksi, mempelajari video-video ulasan yang tersedia di Youtube atau mengikuti bimbingan belajar khusus rekrutmen pegawai pemerintah.

Hasil analisis data juga menemukan bahwa peluang kerja paling banyak terdapat di Kementerian Agama dengan jumlah 1893 formasi. Sebagian besar formasi tersebut nantinya akan ditempatkan di kantor wilayah dan perguruan tinggi di bawah kementerian agama (UIN/IAIN). Hanya sedikit formasi yang akan ditempatkan di kantor pusat. Informasi tersebut dapat dijadikan pedoman bagi lulusan yang berminat mengikuti rekrutmen. Tersedianya informasi tentang jumlah lowongan dan rencana penempatan tentu memudahkan lulusan dalam menentukan pilihan formasi. Informasi tersebut juga menunjukkan keterbukaan informasi rekrutmen pegawai pemerintah yang dahulu terkenal tertutup dan penuh dengan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

4. Kesimpulan

Informasi mengenai peluang kerja dapat membantu calon pelamar untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai kompetensinya. Berdasarkan analisis dalam rekrutmen PPPK Teknis 2022, ditemukan bahwa peluang kerja bagi lulusan program studi pendidikan administrasi perkantoran paling banyak yaitu ahli pertama-arsiparis. Selain itu, instansi paling banyak membuka formasi yaitu Kementerian Agama. Rencana

penempatan paling banyak terdapat pada kantor pemerintah seperti Kanwil, Balai maupun UPT. Lulusan pendidikan administrasi perkantoran harus mempersiapkan diri dengan baik karena peluang kerja tersebut dapat dipilih oleh lulusan program studi lain yang relevan.

5. Referensi

- Citra R, A., & Yunus, M. (2020). Formasi Kebutuhan Pegawai Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Cpns) Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar. *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 47-59. <https://doi.org/10.35673/ajdsk.v5i2.585>
- Hendriani, S., Efni, Y., & Fitriani, A. (2013). Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan, Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Riau Kepri Kantor Pusat Pekanbaru. *Pekbis Jurnal*, 5(2), 133-144.
- Lodico, M. G., Spaulding, D. T., & Voegtler, K. H. (2006). *Methods in Educational Research*. San Francisco: Jossey-Bass
- Mahaputra, A. B., Wairocana, I. G. N., & Satyawati, N. G. A. D. (2014). Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dalam Formasi Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. 1-5.
- Martin, J. (2015). Studi Tentang Proses Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1900-1913.
- Nasrullah, M., Ilmawati, I., Saleh, S., Niswaty, R., & Salam, R. (2018). Minat Menjadi Guru Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. *Jurnal Ad'ministrare*, 5(1), 1-6.
- Prasetio, T., & Hariyani, R. (2021). Konten Lowongan Pekerjaan Bidang Administrasi Perkantoran di Masa Perkembangan Covid-19 di Indonesia. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 5(2), 117-123. <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v5i2.10927>
- Purwanto, P., Rusdiyanto, W., & Respati, Y. A. (2020). Analysis of Secretary Job Advertisement Content for Secretarial Skills Needs. *Jurnal Economia*, 16(1), 44-55. <https://doi.org/10.21831/economia.v16i1.29872>
- Putra, I., Indrayani, L., & ... (2019). Analisis Kebutuhan Pegawai pada Kantor Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali. *Jurnal Pendidikan ...*, 11(2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/21524%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/download/21524/13997>
- Qomarani, L. N. (2020). Anomali Kehadiran Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Dalam Cakrawala Kepegawaian Di Indonesia. *Cepalo*, 4(2), 95-110. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1979>
- Renaldo Potale, B., Lengkong, V., & Moniharapon, S. (2016). Pengaruh Proses Rekrutmen Dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Bank Sulutgo the Influence of the Recruitment Process for and Selection of the Performance of Employees At Pt . Bank Sulutgo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(04), 453-464.
- Tobirin. (2015). Tantangan Dan Peluang Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja Pada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Daerah. *Civil Service*, 9(2), 71-80.